

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN NON INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NAMA SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tugas	: Melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan Kegiatan,Pendataan dan Monev di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Fungsi	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kabinet Kesbangpol Provinsi Kaltim</li><li>b. Pemberian dukungan data atas evaluasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</li><li>c. Evaluasi Perencanaan, Pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Politik Dalam Negeri</li><li>d. Evaluasi Perencanaan, Pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa</li><li>e. Evaluasi Perencanaan, Pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas</li><li>f. Evaluasi Perencanaan, Pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penangan Konflik dan Kewaspadaan</li><li>g. Evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan</li><li>h. Evaluasi Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</li></ul>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESBANGPOL PROV.KALTIM TAHUN 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Alasan	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi	Prosentase (IDI)	Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ada 28 Indikator yang menjadi alat ukur, yang kesemuanya merupakan indikator dari pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kaltim	Koding Koran, Koding Dokumen (Perda/Pergub) FGD, Wawancara Mendalam (WM) dan Skorring yang dilakukan oleh Dewan Ahli IDI	Perhitungan prosentase dilakukan oleh pusat dengan dasar cara perhitungan data koding koran, koding Dokumen, FGD dan Rilis dari	Kaban	IKU

Samarinda, 2 Januari 2020  
 KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUDHA PRANOTO  
 Pembina Utama Madya  
 Nip. 19640817 201006 1 001

## REVIUW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA SKPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tugas	:	Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi norganisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;</li><li>f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;</li><li>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.</li></ol>

## REVIUW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESBANGPOL PROV.KALTIM TAHUN 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Alasan	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya kualitas Demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ada 28 Indikator yang menjadi alat ukur, yang kesemuanya merupakan indikator dari pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kaltim	Perhitungan dilakukan dengan melalui 4 tahapan dengan berdasarkan 28 Indikator, dan 11 Variabel dan 3 Aspek yang menjadi dasar penilaian IDI adalah : 1. Perhitungan Indeks Indikator data Kuantitatif 2. Mempertimbangkan data kualitatif 3. Perhitungan indeks Variabel 4. Perhitungan IDI	4 Metode Pengumpulan data : 1. Koding Koran/Dokumen 2. Wawancara mendalam 3. FGD 4. Rilis  Data No.1 dan 2 menggunakan data kuantitatif sumber data utama sedangkan no.3 dan 4 menggunakan data kuantitatif untuk mengkonfirmasikan, meluruskan dan melengkapi	Kepala Badan	IKU

Samarinda, 16 Nopember 2020  
 Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Drs.Deni Sutrisno,M.Si

Pembina Tingkat I  
 Nip. 19670927 198803 1 013

## REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tugas	: Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi norganisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESBANGPOL PROV.KALTIM TAHUN 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Alasan	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya kualitas Demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ada 28 Indikator yang menjadi alat ukur, yang kesemuanya merupakan indikator dari pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kaltim	<p>Perhitungan dilakukan dengan melalui 4 tahapan dengan berdasarkan 28 Indikator, dan 11 Variabel dan 3 Aspek yang menjadi dasar penilaian IDI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan Indeks Indikator data Kuantitatif</li> <li>2. Mempertimbangkan data kualitatif</li> <li>3. Perhitungan indeks Variabel</li> <li>4. Perhitungan IDI</li> </ol>	<p>4 Metode Pengumpulan data :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koding Koran/Dokumen</li> <li>2. Wawancara mendalam</li> <li>3. FGD</li> <li>4. Rilis</li> </ol> <p>Data No.1 dan 2 menggunakan data kuantitatif sumber data utama sedangkan no.3 dan 4 menggunakan data kuantitatif untuk mengkonfirmasikan, meluruskan dan melengkapi</p>	Kepala Badan	IKU

Samarinda, 16 Nopember 2020  
 KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Drs.Deni Sutrisno,M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19670927 198803 1 013



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Jendral Sudirman No. 1 Lt. 2 Telp. 733333 Fax. 733453 – 741123 – 747128  
**SAMARINDA**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR : 188.4/K. 034 /TU-BKP/XI/2020**

**TENTANG**  
**REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2019-2023**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi  
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalbar,Kalsel dan Kaltim;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;  
7. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Tugas Fungsi dan tata Kerja Badan Kesbangpol Prov.Kaltim

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tahun 2019;

- 2 -

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 188.4/K.26/TU-BKP/XI/2020 TENTANG RIVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan ukuran yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Strategis ( Rentra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 NOPEMBER 2020

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Drs. Deni Sutrisno,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670927 198803 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kalimantan Timur di Samarinda .
3. Inspektor Prov. Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Bappeda Prov.Kaltim di Samarinda
5. Kepala BPKAD Prov.Kaltim di Samarinda
6. Kepala Biro Hukum Sekda Prov.Kaltim di Samarinda

## REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESBANGPOL PROV.KALTIM TAHUN 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Alasan	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya kualitas Demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ada 28 Indikator yang menjadi alat ukur, yang kesemuanya merupakan indikator dari pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kaltim	<p>Perhitungan dilakukan dengan melalui 4 tahapan dengan berdasarkan 28 Indikator, dan 11 Variabel dan 3 Aspek yang menjadi dasar penilaian IDI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan Indeks Indikator data Kuantitatif</li> <li>2. Mempertimbangkan data kualitatif</li> <li>3. Perhitungan indeks Variabel</li> <li>4. Perhitungan IDI</li> </ol>	<p>4 Metode Pengumpulan data :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koding Koran/Dokumen</li> <li>2. Wawancara mendalam</li> <li>3. FGD</li> <li>4. Rilis</li> </ol> <p>Data No.1 dan 2 menggunakan data kuantitatif sumber data utama sedangkan no.3 dan 4 menggunakan data kuantitatif untuk mengkonfirmasikan, meluruskan dan melengkapi</p>	Kepala Badan	IKU

Samarinda, 16 Nopember 2020  
**KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Drs.Deni Sutrisno,M.Si

Pembina Tingkat I  
Nip. 19670927 198803 1 013

